

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah menawarkan potensi besar untuk dimanfaatkan. Namun, sumber daya alam yang begitu luas ini belum dieksploitasi secara optimal. Mineral logam, sebagai sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan, memegang peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Nikel adalah sumber daya mineral yang menjadi komoditas strategis. Hal ini dikarenakan nikel berperan sebagai komponen penting bagi industri baterai kendaraan listrik dan turunannya, bahkan sebagai sumber geotermal dalam pembangkit listrik (Royal Society of Chemistry, 2020).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai 1 Januari 2020 melarang ekspor bijih nikel. Keputusan ini diambil untuk menjaga cadangan nikel serta memastikan kelangsungan pasokan bahan baku bagi smelter yang telah beroperasi. (Izzaty & Suhartono, 2019). Larangan ekspor bijih mentah nikel, hal ini merupakan bentuk usaha dari Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pengembangan industri hilir agar mentah nikel dapat diolah menjadi bentuk setengah jadi maupun bentuk siap pakai (Pasaribu, 2020).

Agenda hilirisasi melalui hasil ekstraksi nikel menghadirkan pola penyebaran emisi industri logam di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan sejak dimulainya proses hilirisasi nikel. Sektor nikel di Indonesia

masih mengandalkan energi batu bara guna mendorong operasinya (PRAKARSA, 2024). Setiap ton nikel yang diproduksi di Indonesia memancarkan sekitar 58,6 ton CO₂ (Ho dan Listiyorini, 2023), diatas rata-rata dunia yang mencapai 48 ton CO₂. Karena itu, produksi nikel yang tinggi di Indonesia menimbulkan ancaman lingkungan yang serius.

Penggunaan PLTU captive (off-grid) yang berada di industri ekstraksi nikel hingga kini masih sangat mengandalkan sumber energi batubara dalam proses smelter nikel. Emisi gas ini merupakan *domino effect* dari penggunaan batubara *captive* untuk memasok listrik smelter nikel dalam kegiatan ekstraksi. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dalam tata kelola industri nikel untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat merasakan manfaat yang berkelanjutan dan seimbang.

Sejak tahun 2010 Indonesia telah mengadopsi standar global melalui *Extractive Industries Transparency Initiatives* (EITI). Standar EITI mendorong transparansi mulai dari perizinan dan kontrak, produksi dan ekspor, penerimaan negara, hingga distribusi ke daerah serta dampak lingkungan dan sosial dari industri ekstraktif. Standarisasi EITI secara bertahap berkembang. Pada 2023, Standar EITI diprediksikan dapat memberikan pengaruh dalam memperkuat sektor *just energy transition and environmental impact*. Meski demikian, tingginya permintaan atas komoditas nikel dan kobal tetap akan berdampak pada lingkungan pertambangan dan masyarakatnya. Kemudian untuk tahun 2025 ini, Standarisasi EITI berfokus pada peningkatan kualitas data dan kepatuhan

terhadap Standar EITI 2023, termasuk pengumpulan data yang lebih komprehensif dari perusahaan untuk memenuhi persyaratan yang terus berkembang.

Pelaksanaan EITI membutuhkan partisipasi beragam pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Keberadaan masyarakat sipil sangat berperan dalam melaksanakan advokasi yang sifatnya transnasional atau *beyond borders* (Putri 2023). Dalam prakteknya, masyarakat sipil tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan adanya Non-Governmental Organization yang mendedikasikan dirinya untuk keberlanjutan atau sustainability terkhususnya dalam tata kelola kegiatan ekstraksi nikel. Non-Governmental Organization dapat memerankan fungsinya sebagai mitra pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya NGO, terdapat peran dalam melakukan advokasi dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan.

Sebagai salah satu dari jejaring advokasi transnasional, PWYP (*Publish What You Pay*) merupakan jaringan organisasi (Non-Governmental Organization/NGO) bekerja dengan masyarakat di daerah yang terdampak oleh kegiatan pertambangan, migas, pertambangan, dan sumber daya alam. PWYP (*Publish What You Pay*) Indonesia dibentuk untuk mengupayakan pengelolaan sumber daya ekstraktif dengan prinsip terbuka dan akuntabilitas di tingkat nasional maupun global. PWYP (*Publish What You Pay*) Indonesia melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi EITI. Selain itu,

inisiatif ini berfokus pada penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar dapat mewakili kepentingan publik serta berpartisipasi aktif dalam reformasi tata kelola sektor ekstraktif demi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Deputi Direktur Publish What You Pay Indonesia, Meliana Lumbantoruan, pengawasan terkait aktivitas industri tambang nikel dinilai belum maksimal. Batasan kewenangan pemerintah provinsi, ditambah konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, memperumit pengelolaan situasi. Upaya ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyelarasan kebijakan dengan berbasis riset dan Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dipilih karena pendekatan yang dilakukan dirasa lebih terstruktur dan terarah dalam memengaruhi kebijakan sebagai panelis pelaku advokasi.

Pendekatan melalui advokasi kebijakan ini dianggap Penulis lebih berdampak secara nyata dalam perubahan regulasi daripada melakukan aksi demonstrasi. Dilihat dalam laman PWYP Indonesia, NGO ini senantiasa menghadirkan beberapa pihak mulai dari Akademisi, organisasi masyarakat sipil lainnya, pemerintah, hingga pelaku industry. Untuk itu kemudian Penelitian ini akan berfokus pada strategi yang digunakan oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia melalui advokasi kebijakan dalam upayanya menangani kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh agenda

ekstraksi dari hilirisasi pemanfaatan nikel dari sector Pemerintah, NGO, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan mengawal transisi energi yang berkeadilan di Indonesia, *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dengan dukungan Sekretariat Internasional EITI melaksanakan program “Pelibatan Komunitas Dalam Transisi Energi Berkeadilan Melalui Implementasi EITI”. Program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat sipil dan komunitas lokal khususnya yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak transisi energi terhadap sektor ekstraktif karena menurut Mouna Wasef sebagai perwakilan pihak dari *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia bahwa industri nikel di Morowali Utara berkembang sangat pesat.

Dalam perjalanannya, penerapan EITI di Indonesia berfokus pada transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif. Untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam serta memfasilitasi transisi energi lewat kegiatan ekstraksi, pelaksanaan EITI dimaksudkan membantu masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, agar memperoleh wawasan mendalam tentang pengaruh peralihan menuju energi bersih dalam konteks sektor ekstraktif. Urgensi Standar *Extractive Industries Transparency Initiatives* (EITI) belum diketahui secara meluas dalam kalangan masyarakat daerah Kabupaten Morowali Utara terkhususnya pada kawasan desa yang terdampak.

Keberadaan standar EITI dapat memengaruhi penerimaan negara, keputusan investasi, serta pembangunan di tingkat lokal. Upaya ini diperkirakan dapat menjadi penyeimbang dari regulasi yang ada karena Standar EITI memberikan kewajiban Negara dan Korporasi dalam melaporkan informasi serta data mengenai perbandingan atas pendapatan penerimaan negara dengan pembayaran yang dilakukan korporasi di sektor ekstraktif. Dengan adanya standar ini maka laporan atas hasil dari proses standarisasi tersebut akan diketahui oleh publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut: Apa saja upaya advokasi *Publish What You Pay* melalui implementasi dari *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) terhadap tata kelola kegiatan ekstraktif nikel di Kabupaten Morowali Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui dan menganalisis peranan *Non-Governmental Organization: Publish What You Pay* terhadap agenda ekstraksi nikel di Morowali Utara.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi advokasi PWYP (*Publish What You Pay*) Indonesia di Morowali Utara melalui implementasi dari *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu mengenai peran PWYP (*Publish What You Pay*) Indonesia sebagai NGO dalam melakukan advokasi.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, organisasi internasional, dan peneliti berikutnya sebagai referensi terkait strategi advokasi PWYP (*Publish What You Pay*) Indonesia melalui implementasi dari *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI).

1.5. State of Arts

Penelitian Terdahulu			
No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rossi Wardani (2024, Universitas Paramadina)	Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia:	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan dan arah gerakan NGO serta masyarakat sipil di Indonesia. Analisis data dilakukan

		Periode 2024-2025	dengan pengumpulan data secara terorganisir berdasarkan data relevan dengan tujuan penelitian. Proses triangulasi data diterapkan melalui proses membandingkan dan verifikasi informasi dari berbagai sumber yang relevan. Organisasi non-pemerintah (<i>Non-Governmental Organizations/NGO</i>) dan masyarakat dipandang sebagai aktor dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta berbagai isu strategis lainnya. Selain itu, keduanya juga berperan signifikan dalam mendorong proses pengembangan kapasitas masyarakat serta menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan di dalam suatu negara. Meskipun demikian, ditemukan tantangan seperti keterbatasan peraturan dalam hal kebebasan berpendapat, tekanan politik, dan intervensi pihak terkait serta perubahan sosial-budaya. Untuk mengatasinya, diperlukan perpaduan antara pemerintah, masyarakat dengan lembaga internasional secara seimbang.
2.	Sutan Sorik dan Laely Nurhidayah (Pusat Riset Hukum, badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024)	Peran Organisasi Non Pemerintah dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia	Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian juga memanfaatkan adanya pendekatan peraturan dengan peran NGO terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam skala

			<p>global, NGO memberikan dampak penting dalam memberikan pengaruh atas kebijakan lingkungan hidup. Organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Selain berperan sebagai pemangku kepentingan dalam kebijakan pemerintah, NGO juga berkontribusi dalam mendorong kerja sama internasional melalui partisipasi serta mobilisasi masyarakat secara aktif.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterkaitan dan perbedaan antara studi-studi sebelumnya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu diatas hanya menjelaskan dari peranan NGO dalam melakukan advokasi yang berimplikasi pada kebijakan lingkungan hidup secara umum. Berdasarkan perbandingan penelitian di atas, permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yaitu terkait peranan yang dipegang oleh *Non-Governmental Organization* dalam melakukan advokasi dan pengawasan lingkungan. Selanjutnya dalam Penelitian yang penulis lakukan, diharapkan *standing* dari *Non-Governmental Organization* untuk mengoptimalkan mutu pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan penjelasan terkait peranan NGO dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan kajian pustaka dan fakta lapangan. Penelitian mengindikasikan bahwa LSM memiliki peran penting dalam melindungi sumber daya alam, menjaga kelestarian

lingkungan, serta membantu mengatasi isu-isu lingkungan yang terkait dengan agenda penambangan nikel. Dengan adanya hilirisasi dalam bentuk ekstraksi nikel yang terjadi, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor biji nikel. Sementara itu, sektor nikel memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat transisi energi, tetapi pertumbuhan cepatnya harus disertai dengan fokus yang mendalam pada akibat lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan konsep Advokasi melalui jejaring advokasi transnasional untuk memengaruhi kebijakan yang didukung oleh konsep *political opportunity*, dengan maksud penyeimbangan advokasi dan pergerakan sosial secara global. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh PWYP Indonesia sebagai NGO perwakilan masyarakat menetapkan kebijakan publik sebagai target pada setiap program. Menurut William N. Dunn (2003) yang dikutip dalam Anggara (2014), analisis kebijakan dalam cakupan historis yang paling luas adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah sosial, yang bermula pada suatu momen penting ketika pengetahuan secara sengaja ditelusuri untuk diuji secara eksplisit dan reflektif dengan mengaitkannya pada tindakan. Kebijakan publik adalah serangkaian langkah yang diambil pemerintah, berorientasi pada kepentingan umum, serta melibatkan pemilihan alternatif untuk dijalankan atau tidak demi kepentingan publik (Pasolong, 2008).

1.5.1. Konsep Transnational Advocacy Network

Jaringan Advokasi Transnasional merujuk pada kumpulan aktor yang berbagi nilai, norma, serta wacana informasi dan sumber

daya lain dalam berkooperasi terhadap masalah berskala internasional (M E Keck & Sikkink, 1998). Di antara berbagai peran, lembaga non-pemerintah baik yang berbasis domestik maupun internasional memegang peran kunci dalam pembentukan jaringan advokasi transnasional (Margaret E Keck & Sikkink, 1999).

Untuk memengaruhi wacana, prosedur dan kebijakan, jaringan advokasi transnasional dapat menjadi bagian dari komunitas kebijakan yang lebih besar dalam kelompok tersebut dari berbagai posisi institusional dan nilai (Keck dan Sikkink, 1999). Jaringan advokasi transnasional dapat dipahami sebagai ruang politik di mana *stakeholders* dapat menentukan tujuan bersama karena sifatnya yang merupakan struktur komunikatif. Seccara pengertian, jaringan advokasi adalah organisasi dengan interaksi dan bersifat sukarela, timbal balik, dan horizontal.

Menurut Keck dan Sikkink, jaringan advokasi yang berpengaruh terbentuk lewat penciptaan relasi diantara aktor bidang masyarakat, pemerintah, serta organisasi internasional, sehingga mereka memperluas akses ke sistem internasional. Jaringan advokasi transnasional melibatkan para aktor yang beroperasi melalui nilai-nilai yang sama, serta menyediakan layanan dan bertukar berita secara intensif. Usaha memengaruhi, menyebarkan, dan melakukan upaya persuasif, terdapat empat tipe taktik, yaitu

politik informasi, politik simbolik, politik leverage, dan politik akuntabilitas. Empat tipe taktik dijalankan oleh kelompok advokasi transnasional untuk tujuan sosialisasi (Keck and Sikkink, 1999), antara lain:

- a. *information politics*, yaitu kemampuan menciptakan data serta mengarahkan dampak yang timbul darinya demi efektivitas proses advokasi;
- b. *symbolic politics*, yakni kapasitas melalui tindakan dengan menimbulkan pandangan masyarakat. Setelah LSM dan masyarakat sipil mengenali dan menjabarkan alasan kuat terkait peristiwa;
- c. *leverage politics*, ialah keahlian memanfaatkan posisi atau kekuatan tertentu untuk memengaruhi situasi ketika pihak lain tidak memiliki pengaruh yang cukup;
- d. *accountability politics*, upaya menjaga agar aktor berkuasa tetap menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. *Transnational Advocacy Network* dalam Agenda Ekstraksi Nikel

Jaringan advokasi lintas negara atau *Transnational Advocacy Network* (TAN) merujuk pada jaringan aktivitas advokasi yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai latar belakang negara

terkait untuk memperjuangkan target. Jaringan ini biasanya berfungsi sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang berupaya memengaruhi kebijakan publik, baik pada *Transnational Advocacy Network* berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) dalam melakukan advokasi terhadap isu maupun kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan yang diperjuangkan. *Transnational Advocacy Network* (TAN) berperan secara signifikan dan memiliki pengaruh dalam merekonstruksi lembaga internasional.

Studi ini memakai konsep Jaringan Advokasi Transnasional yang dipopulerkan Margareth Keck dan Kathryn Sikkink. dengan memuat 4 (empat) Strategi advokasi dalam melakukan tata Kelola lingkungan terbagi menjadi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas.

Yang pertama adalah strategi politik informasi yang berbentuk penggunaan data penelitian menjadi basis kampanye guna mempercepat penyajian informasi dan agar menghasilkan pengaruh signifikan bagi publik (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Yang kedua adalah strategi politik simbolik berupa usaha pengelompokkan isu dengan bahasa sederhana agar bisa dimengerti masyarakat dan berdampak terhadap pemberian atensi dalam mendukung posisi dan tuntutan advokasi.

Yang ketiga adalah strategi politik pengaruh dalam bentuk strategi guna memengaruhi pihak lain layaknya pemerintah dari negara lain, organisasi internasional, juga perusahaan multinasional dalam menekan pihak yang dituju dengan tujuan agar kebijakan yang ada dapat mengalami perubahan. Yang keempat adalah strategi politik akuntabilitas dimana upaya dilakukan guna memberikan kepastian terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan prinsip-prinsip yang telah disetujui. Melalui keempat strategi ini, NGO dan jaringan advokasi diharapkan agar selalu berada di pihak masyarakat dalam memengaruhi pemerintah untuk merubah kebijakan yang telah ada.

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, argumentasi utama adalah strategi advokasi *Publish What You Pay* (PWYP) dengan parameter *transnational advocacy network* berupa *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* berdasarkan implementasi dari Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) terhadap tata kelola kegiatan ekstraktif nikel. Pelaksanaan keempat strategi ini, dilakukan melalui proses *political opportunity* sebagai gerakan sosial untuk memengaruhi kebijakan dengan adanya penyediaan layanan, advokasi, inovasi, dan pemantauan

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (dalam Raco, 2010), pendekatan kualitatif bertujuan menggali

permasalahan di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis isu-isu yang dihadapi individu, kelompok, program, organisasi, budaya, agama, wilayah, maupun negara. Dengan pertimbangan tersebut, penulis memanfaatkan metode kualitatif untuk mengidentifikasi secara menyeluruh pengaruh peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan dan advokasi kebijakan luar negeri terkait agenda ekstraksi nikel.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif berupa uraian tentang strategi-strategi advokasi yang dilakukan oleh *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia dalam tata kelola kegiatan ekstraksi nikel di Kabupaten Morowali Utara.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian (Creswell, 2009). Penulis mendapatkan data berdasarkan lokasi yang berada di Kabupaten Morowali Utara dengan didukung oleh wawancara Panelis dari PWYP (*Publish What You Pay*) Indonesia.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi dari latar penelitian (Moleong dalam Nugrahani, 2014). Subjek dalam penelitian ini yaitu *Publish What You Pay*

(PWYP) Indonesia sebagai *Non-Governmental Organization* dalam melakukan strategi advokasi.

1.8.4. Jenis Penelitian

Data penelitian merupakan segala informasi maupun bahan yang tersedia harus dicari, dikumpulkan, serta dipilih. Menurut Edi Subroto (dalam Nugrahani, 2014), data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya seperti kata, ungkapan, kalimat, dan tindakan (Nugrahani, 2014). Sehingga jenis data dalam penelitian ini guna menjawab perumusan masalah mengenai strategi advokasi *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia mengenai agenda ekstraksi nikel.

1.8.5. Sumber Penelitian

Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang didapatkan melalui kajian kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel berita, serta situs resmi terkait yang diperoleh melalui internet (Nugrahani, 2014).

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bersifat non-interaktif, yaitu melalui wawancara dan analisis dokumen dengan melakukan kajian pustaka guna memperoleh data terkait topik penelitian (LeComte dalam Nugrahani, 2014).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data ialah proses mengumpulkan dan mengorganisasi secara sistematis terkait data yang diperoleh kemudian dipilih mana yang penting sehingga memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2019). Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis data. Metode analisis dalam studi ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan pendekatan dengan mencakup proses mengolah data yang telah dikumpulkan dan terorganisir, sehingga menghasilkan data penelitian yang terangkum dengan jelas (Winarno, 1998).